



Analisis Framing Intimidasi Pemerintah Lampung Terkait Infrastruktur Di Kompas.Com & Detik.Com

Dinda Putri Damara¹, Dewa Ayu Chyntia Novyanti², Nabila Cahyani Putri³, Nafisa Rihadatul Aisy⁴, Roro Retno Woelan⁵

^{1,2,3,4,5}Telkom University

Abstract

Received: 23 Juli 2023
Revised: 31 Juli 2023
Accepted: 02 Agustus 2023

Pada tanggal 7 April 2023 sebuah video viral berisi kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Lampung diunggah oleh seorang warganya bernama Bima Yudho Saputro melalui akun @awbimaxreborn pada media sosial TikTok. Melihat video tersebut, tanggapan dari Pemerintah Lampung juga ikut tersorot publik akibat sikapnya yang dinilai mengintimidasi keluarga dari Bima Yudho. Studi ini bermaksud guna mengetahui analisis framing pemberitaan sikap intimidasi yang dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat yang memberikan kritik, di media online Kompas.com dan Detik.com. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model analisis framing Robert N. Entman yang terdiri dari penentuan masalah, penyebab masalah, pengambilan keputusan moral, dan penyelesaian masalah. Subjek penelitian ini diambil dari website Kompas.com dan Detik.com edisi April - Mei 2023. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya Kompas.com dalam isu ini lebih menonjolkan tanggapan, dan mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap kinerja dan sikap Pemerintah Lampung. Sedangkan pada Detik.com lebih menunjukkan sikap keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.

Keywords: *Framing Robert N. Entman, Government of Lampung, Online Media.*

(*) Corresponding Author: chintyanv13@gmail.com

How to Cite: Damara D P, Novyanti D A C, Putri N C, Aisy N R, & Woelan R R. (2023). Analisis Framing Intimidasi Pemerintah Lampung Terkait Infrastruktur Di Kompas.Com & Detik.Com. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8237525>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin pesat, menawarkan berbagai manfaat bagi para penggunanya. Melalui jaringan Internet, setiap orang dapat mengakses informasi melalui ponsel atau alat komunikasi lain dengan lebih mudah. Media sosial merupakan salah satu sarana untuk memperoleh informasi yang sering digunakan masyarakat saat ini.

Di sisi lain, media sosial dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Seluruh masyarakat dapat mengekspresikan dirinya melalui media sosial, misalnya dengan mengkritisi dan merekomendasikan solusi atas permasalahan masyarakat. Setiap individu memiliki kebebasan berpendapat yang tercantum dalam "Pasal 23 ayat 2 dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia". Masyarakat bebas menyampaikan pendapat berupa kritik dan saran terhadap pemerintah. Namun pada kenyataannya, banyak isu yang muncul ketika masyarakat mengkritisi pemerintah melalui media sosial.

Di satu sisi, media sosial memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, namun di sisi lain menjadi ancaman bagi penggunanya karena UU ITE membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Saat ini, banyak orang telah dihukum sebab dianggap sudah mencemarkan nama baik

serta mendapatkan ancaman, salah satu kasus yang menimpa seorang warga Lampung yang bernama Bima Yudho Saputro. Kasus tersebut bermula dari video yang di *upload* Bima dalam media Sosial Tiktok pada 7 April 2023 yang berisi kritikan kepada pemerintah Provinsi Lampung. Video tersebut menjadi viral dan membuat warga Lampung lainnya ikut serta membuat konten yang berisi kondisi infrastruktur yang kurang baik di Lampung mulai dari jalanan rusak, sistem pendidikan yang kurang memadai dan sebagainya. Hal tersebut membuat Gindha Ansori, seorang advokat asal Lampung yang melaporkan Bima ke Polda Lampung. Bima dilaporkan karena videonya yang berisi kritikan penghinaan melalui kata-kata yang digunakan dianggap sebagai pelanggaran UU ITE.

Keluarga Bima menjadi sorotan setelah video Bima menjadi viral, Gubernur Lampung menyebut bahwa orang tua Bima tidak bisa mendidik anaknya, dan pihak kepolisian mendatangi rumah Bima untuk bertemu langsung dengan kedua orangtuanya. Ketika orangtua Bima dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur, Gubernur menelepon Wakil Bupati dan orangtua bisa karena terjadi *miscommunication* dan terdapat kata-kata yang sedikit kurang bijak dari Gubernur.

Kasus-kasus yang dianggap membatasi kebebasan berbicara menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk melakukan kritik kepada pemerintah, sedangkan masyarakat menganggap bahwa pemberian kritik kepada pemerintah sebagai masukan untuk melakukan perbaikan kedepannya. Sehingga penulis tertarik mengkaji dalam artikel berjudul "Analisis Framing Intimidasi Pemerintah Lampung Terkait Infrastruktur di Kompas.com dan Detik.com". Tujuan penulisan artikel ini ialah guna mengetahui analisis framing pemberitaan sikap intimidasi yang dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat yang memberikan kritik, di media *online* Kompas.com dan Detik.com.

METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan pada studi ini merupakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memiliki asumsi yaitu peneliti berusaha untuk menafsirkan makna yang dimiliki orang lain di dunia (Creswell, 2016). Maka, analisis paradigma konstruktivis berfokus pada penentuan bagaimana suatu peristiwa atau realitas dikonstruksi dan dibentuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2017) Metode penelitian kualitatif bertujuan guna memahami secara komprehensif dan deskriptif, dalam konteks ilmiah, fenomena yang dialami subjek dalam arti kata dan bahasa. Metode kualitatif sesuai dengan tujuan peneliti dalam melakukan analisa berita terkait isu intimidasi Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat yang mengkritik kinerja pemerintah pada portal berita Kompas.com dan Detik.com edisi 13 April - 6 Mei 2023. Adapun judul berita media *online* Kompas.com dan Detik.com yang akan dianalisis oleh peneliti yaitu:

Tabel Judul Berita Media *Online* Kompas.com dan Detik.com

No	ggal Terbit Artikel	Judul Artikel Media <i>Online</i> Kompas.com	ggal Terbit Artikel	Judul Artikel Media <i>Online</i> Detik.com
1.	April 2023	“Saat Bima Yudho Kritik Lampung di TikTok: Diadukan ke Polisi, Diintimidasi hingga Dapat Dukungan”	April 2023	Viral 'Lampung Dajjal', Jalanannya Bikin Geleng-geleng Kepala
2.	April 2023	“Kronologi TikToker Bima Dipolisikan Usai Bikin Video “Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju”	April 2023	LPSK: TikToker Bima Bisa Ajukan Perlindungan Jika Terancam
3.	April 2023	“Soal Kasus Bima Kritik Lampung, Mahfud MD:	April 2023	Jreng! Anggaran Infrastruktur
		Karena Ada Laporan Harus Diproses, Bisa Ditutup Jika Tak Terbukti”		Lampung Mulai Dipelototi Kemendagri
4.	April 2023	“Buntut Kritik TikToker, KPK Diminta Bergerak Periksa Pemprov Lampung”	ei 2023	Jokowi Cek Jalan di Lampung yang Dijuluki 'Dajjal', Apa yang Bakal Dilakukan?
5.	April 2023	“Polda Lampung Hentikan Kasus TikToker Bima, Ini Respons Keluarga”	ei 2023	Zulhas Ungkap Jalan di Lampung Ada yang Sudah Rusak 20 Tahun

Terdapat 10 berita dari kedua media online yang akan dianalisis pada penelitian ini. Dengan rincian 5 artikel di Kompas.com dan 5 artikel di Detik.com. Keseluruhan artikel yang diulas yaitu pada edisi 13 April hingga 6 Mei 2023. Peneliti memilih sepuluh artikel berita sebagai objek penelitian karena sepuluh artikel berita tersebut mewakili keprihatinan peneliti dan memiliki konteks kasus yang sama, namun berbeda dalam penyajian dan visibilitas fakta.

Studi ini menggunakan teknik analisis kerangka kerja Robert N. Entman. Framing adalah metode untuk menganalisis bagaimana media menggambarkan peristiwa aktual (Mulyana & Eriyanto, 2011). Cara penyampaian berita dapat dilihat dengan memeriksa aktualitas kasus yang diangkat menjadi berita. Analisis

kerangka membantu menentukan siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang kalah, siapa yang ditindas dan siapa yang ditindas, dan kebijakan mana yang didukung atau ditentang. Menurut Robert N Entman, paradigma analisis framing terdiri dari empat komponen: “Mendefinisikan Masalah (*Define Problem*) adalah bagaimana suatu peristiwa dirasakan, serta masalah apa yang diwakilinya; *Diagnose Cause* (sumber masalah) yaitu bagaimana suatu kejadian dilihat, apa yang menjadi penyebab masalah dan faktor apa yang diyakini sebagai penyebab masalah; *Make Moral Judgement* adalah nilai moral apa yang dihadirkan untuk menjelaskan suatu masalah dan nilai moral apa yang digunakan untuk membenarkan suatu tindakan; serta *Treatment Recommendation*, solusi apa yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut” (Kurniawan Siregar & Qurniawati, 2022).

Dengan memanfaatkan teknik analisis framing, peneliti akan menggambarkan bagaimana pembingkaiian pemberitaan portal berita Kompas.com dan Detik.com terhadap isu Intimidasi Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat yang mengkritik kinerja pemerintah baik dari penyeleksian isu maupun penonjolan aspek tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berikut adalah hasil pemilihan topik dan penekanan aspek dari artikel berita yang diterbitkan oleh Kompas.com dan Detik.com antara 13 April-6 Mei 2023. Sebelum dianalisis memakai metode framing model Robert N. Entman, kedua pemberitaan ini diidentifikasi isu dan penonjolan aspeknya, seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel Seleksi Isu dan Penonjolan Aspek Kompas.com

Judul Artikel Berita	Seleksi Isu	Penonjolan Aspek
“Saat Bima Yudho Kritik Lampung di TikTok: Diadakan ke Polisi, Diintimidasi hingga Dapat Dukungan”	Adanya seorang masyarakat Lampung yang menyuarakan kritikan terkait infrastruktur di kotanya yang tidak layak melalui media sosial TikTok, hingga diproses ke jalur hukum.	Pernyataan dari narasumber Kabid Humas Polda Lampung secara resmi menerima laporan dugaan pelanggaran UU ITE. Bima mendapatkan dukungan dari Anggota DPR RI dapil 1 Taufik Basari bahwa yang diungkapkan Bima adalah bentuk masukan kepada pemerintah Lampung.

<p>“Kronologi TikToker Bima Dipolisikan Usai Bikin Video “Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju”</p>	<p>Bima Dilaporkan ke Polda Lampung oleh Gindha Ansori Wayka terkait pelanggaran UUTE.</p>	<p>Pernyataan resmi dari narasumber Kabid Humas Kepolisian Lampung bahwa polisi masih melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan masih mendalami laporan karena itu, polisi belumbisa memastikan Bima, peserta terlapor, memenuhi unsur pidana atau tidak.</p>
<p>“Soal Kasus Bima Kritik Lampung, Mahfud MD: Karena Ada Laporan Harus</p>	<p>Kritikan yang dilontarkan oleh TikToker Bima Yudho dianggap melanggar UU ITE</p>	<p>Menko Polhukam yaitu MahfudMD memberikan terkait laporan yang dilayangkan oleh</p>
<p>Diproses, Bisa Ditutup JikaTak Terbukti”</p>	<p>oleh Gindha Ansori. Sehingga terdapat pro kontra dari masyarakat yang mengatakan bahwa Pemerintah Anti Kritik.</p>	<p>Gindha Ansori kepada Bima Yudho yang membuat konten “Alasan Lampung Gak Maju-Maju”.</p>
<p>“Buntut Kritik TikToker, KPK Diminta Bergerak Periksa Pemprov Lampung”</p>	<p>KPK diminta untuk bergerak memeriksa Pemerintah Provinsi Lampung terkait infrastruktur di daerah itu.</p>	<p>Pernyataan dari narasumber Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengatakan lampung bukan pertama kali berurusan dengan KPK akibat dugaan korupsi. KPK harus curiga dengan APBD untuk perbaikan jalan yang tidak ada perubahan dari tahun ketahun.</p>

<p>“Polda Lampung Hentikan Kasus TikToker Bima, Ini Respons Keluarga”</p>	<p>Polisi resmi menghentikan kasus dugaan pelanggaran UUITE yang menjerat TikToker Bima.</p>	<p>Menurut keterangan Kabid Humas Polda Lampung, tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan yang menjerat Bima. Usai kasus ditutup, pihak keluarga Bima menyampaikan apresiasi kepada Polda Lampung.</p>
---	--	--

Tabel Isu Seleksi dan Penonjolan Aspek Detik.com

Judul Artikel Berita	Seleksi Isu	Penonjolan Aspek
<p>“Viral 'Lampung Dajjal', Jalanannya Bikin Geleng-geleng Kepala”</p>	<p>Akun tiktok @awbimaxreborn mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung dan menyebut Lampung sebagai provinsi Dajjal.</p>	<p>Kritikan yang dilontarkan oleh TikToker Bima Yudho terkait infrastruktur yang rusak di Provinsi Lampung dapat dikatakan sebagai fakta. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat Lampung yang turut membuat konten yang berisi sindiran dengan memperlihatkan kondisi</p>
		<p>infrastruktur yang rusak dalam video yang mereka unggah.</p>

<p>LPSK: TikToker Bima Bisa Ajukan Perlindungan Jika Terancam</p>	<p>TikToker Bima dan keluarganya bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jika merasa terancam.</p>	<p>Pernyataan dari narasumber Kapolres Lampung Timur pihak polisi datang kerumah Bima untuk memastikan identitas sesuai dengan alamatnya, Juliman selaku orangtua Bima juga berterimakasih kepada jajaran Kapolres dan Kapolsek yang telah menjaga ketat rumahnya.</p>
<p>Jreng! Anggaran Infrastruktur Lampung Mulai Dipelototi Kemendagri</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pertemuan khusus dengan Pemerintah Provinsi Lampung Membahas terkait anggaran Infrastruktur provinsi Lampung.</p>	<p>Pernyataan dari narasumber yaitu Kepala Pusat Penerangan Kemendagri menyatakan salah satu hasil rapat yaitu mendorong Pemda Lampung untuk memberikan penjelasan kepada publik. Dana APBD tidak sepenuhnya dialokasikan untuk perbaikan jalan namun digunakan juga untuk pemeliharaan jaringan dan irigasi.</p>
<p>“Jokowi Cek Jalanan di Lampung yang Dijuluki 'Dajjal', Apa yang Bakal Dilakukan?”</p>	<p>Presiden Joko Widodo turun tangan langsung menghadapi kasus jalan rusak di Provinsi Lampung.</p>	<p>Pernyataan dari narasumber yaitu Joko Widodo akan memastikan apakah berita yang ada di media benar atau tidak, banyaknya permasalahan mengenai anggaran daerah tidak diarahkan untuk perawatan infrastruktur.</p>
<p>Zulhas Ungkap Jalan di Lampung Ada yang Sudah Rusak 20 Tahun</p>	<p>Presiden Joko Widodo bersama menteri PerdaganganZulkifli Hasan meninjau jalan rusak di Provinsi Lampung.</p>	<p>Pernyataan dari narasumber Zulhas jalanan rusak akan dikebut pada bulan juni 2023dan diambil alih oleh PUPR.</p>

A. Pembahasan

Media sosial menjadi salah satu sarana yang berperan dalam menciptakan komunikasi yang berlangsung secara dua arah menggantikan upaya media satu arah tradisional (Shimp & Andrews, Craig, 2013). Banyaknya kemudahan yang dirasakan *user* saat menggunakan media sosial, menyebabkan pengguna bebas untuk mengakses dan menyebarkan informasi. Seperti yang terjadi belakangan ini yaitu adanya kasus yang menimpa TikToker asal Lampung yang bernama Bima Yudho yang memberikan kritikan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung. Hal tersebut viral di media sosial dan banyak mendapat perhatian publik. Kasus viral ini juga dibahas melalui berbagai media pemberitaan *online* seperti, Kompas.com dan Detik.com. Kedua media ini mengangkat berita yang sama terkait video viral berisi kritik terhadap kinerja Pemerintah Lampung diunggah oleh seorang warganya bernama Bima Yudho melalui akun @awbimaxreborn pada media sosial TikTok. Kasus ini menyebabkan pro dan kontra dari banyak pihak, terutama masyarakat.

Atas viralnya video tersebut, beberapa media pemberitaan *online* ikut menyoroiti isu ini. Kompas.com dan Detik.com mengangkat isu hangat mengenai sikap intimidasi Pemerintah Lampung kepada Bima Yudho atas kontennya tersebut. Melalui kasus ini, peneliti menggunakan 10 berita yang diunggah pada 13 April hingga 6 Mei 2023 yang akan dianalisis memakai model analisis framing Robert N Entman dengan empat perangkat framing sebagai berikut:

a. *Define Problem*

Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Kompas.com mengenai isu intimidasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Lampung terkait kritik yang disampaikan oleh salah satu warganya Bima Yudho Saputro melalui akun TikToknya @awbimaxreborn masih menuai polemik, hingga respon pro dan kontra. Sikapkecaman yang dilontarkan oleh pihak Pemerintah Lampung tersebut menjadi bahan perbincangan karena dinilai membatasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi warganya dimuka publik, dalam hal ini ranah media sosial. Banyak pihak merasa dengan sikap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Lampung menghalangi hak demokrasi masyarakat, dan mencerminkan pemerintah yang *anti-critics*. Yang pada awalnya Bima Yudho dilaporkan ke Polda Lampung terkait pelanggaran UU ITE, tetapi hal tersebut masih dalam penyelidikan atas laporan tersebut dan Karena itu, polisi belum bisa memastikan Bima, peserta terlapor, memenuhi unsur pidana atau tidak.

Terkait hal mengenai framing oleh Detik.com pun menuai pendefinisian masalah terkait adanya isu yang sama oleh Bima Yudho Saputro yang membuat video viral berisi kritik terhadap kinerja Pemerintah Lampung, hal tersebut didukung oleh banyaknya masyarakat yang memperkuat bukti video kritikan dengan memperlihatkan kondisi infrastruktur jalanan yang rusak hingga sindiran kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan adanya isu tersebut, Bima Yudho dilaporkan atas kritikan yang dibuat tetapi disisi lain Bima dan keluarganya bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK jika merasa terancam atas isu yang dilaporkan.

a. *Diagnose Causes*

Kompas.com menyampaikan penyebab yang menjadi permasalahan pada

isu intimidasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Lampung. Terlebih dari pemberitaan oleh Kompas.com menjabarkan isi dari kritik yang disampaikan oleh salah satu warganya Bima Yudho Saputro melalui akun TikTiknya @awbimaxreborn seperti infrastruktur jalan di wilayah kota Lampung masih banyak yang rusak di mana kritikan tersebut mampu menjadi input yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi terkait kerusakan yang dialami oleh masyarakat Kota Lampung, selain itu dalam media Twitter melalui unggahan yang disebar oleh @Pdemokrat diharuskan untuk meningkatkan urgensi pemerintah dalam menghimbau pembangunan infrastruktur jalan-jalan umum dalam penghubung desa, kecamatan atau kabupaten dibandingkan jalan tol karena hal tersebut merupakan jalan strategis yang dilalui oleh masyarakat yang menjadi jalur ekonomi rakyat.

Isu yang menjadi permasalahan video yang diunggah terkait kritikan yang dilakukan oleh Bima Yudho Saputro kepada pihak Pemerintah Lampung, Analisis framing melalui detik.com pun mengangkat berita ini menjadi salah satu permasalahan pro dan kontra dari adanya isu tersebut, dengan infrastruktur jalanan rusak yang ada di Kota Lampung menuai sorotan terlebih Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pertemuan khusus dengan Pemerintah Provinsi Lampung di mana akan membahas terkait anggaran Infrastruktur provinsi Lampung. Yang pada akhirnya menurut salah satu narasumber yang mengikuti rapat yaitu Kepala Pusat Penerangan Kemendagri menyatakan akan memberi penjelasan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalanan yang rusak.

b. Make Moral Judgment

Setiap orang memiliki kebebasan berpendapat dan kritik yang dilakukan oleh Bima bukan hal yang salah, karena memberikan kritikan dan pendapat mengenai hal yang dianggapnya tidak baik dan meminta pemerintah untuk mendengar keluhannya. Munculnya video yang dibuat oleh Bima tentunya memiliki tujuan tertentu dan hal-hal yang diinginkan berupa respon positif dari pemerintah Kota Lampung.

Melalui framing yang tersedia pada berita Kompas.com, nilai moral yang terdapat dalam kasus Bima yaitu upaya pemerintah untuk terus menerima pendapat dan kritikan yang masuk dari masyarakat dalam membantu memperbaiki infrastruktur daerah. Salah satu caranya dengan mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa harus menghakimi dan melakukan intimidasi terhadap korban dan keluarganya. Kebebasan pendapat yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan Undang- Undang yang ada, sebaiknya para pemerintah menerima masukan dan memberikan respon dengan kata-kata bijak.

Sedangkan atas framing pada berita Detik.com memiliki nilai moral bahwa sudah semestinya pemerintah memiliki sikap terbuka kepada publik. Hal ini juga terkait aspirasi atas fasilitas yang kurang memadai. Maka, tindakan yang semestinya dilakukan adalah melakukan penyempurnaan transparansi informasi baik terkait kondisi fasilitas, dan juga anggaran yang digunakan bukan melakukan intimidasi.

c. Treatment Recommendation

Kebebasan berpendapat adalah hal yang penting dalam sebuah negara demokrasi khususnya di Indonesia. Sejak lama Indonesia sudah memiliki Undang-

Undang sebagai payung hukum dari segala peraturan, salah satunya yang mengatur mengenai jaminan kebebasan berpendapat. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait framing yang diberitakan oleh Kompas.com yakni pemerintah sebagai aparat negara seharusnya sudah mengerti dengan adanya hak konstitusional oleh setiap Warga Negara Indonesia. Dengan adanya kritikan yang dilontarkan Bima Yudho yang merupakan masyarakat Lampung seharusnya Pemerintah Lampung mendengarkan bukan malah mengintimidasi warganya. Dimana kritikan masyarakat pasti disampaikan berdasarkan realita yang dilihat di lapangan ditambah lagi banyak masyarakat Lampung yang turut berkomentar yang menyetujui kritikan Bima tersebut. Kritikan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Lampung untuk memperbaiki kinerja dan segala infrastruktur yang ada di kota tersebut.

Hal yang sama terkait framing yang diberikan oleh Detik.com, seharusnya lembaga pemerintah tingkat provinsi mampu mengayomi masyarakat dengan baik melalui bertanggung jawab atas kondisi daerahnya. Sikap terbuka dan menerima kritik sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemerintah provinsi Lampung yang menyambut aspirasi Bima dengan baik serta memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran dana, dan segera menindaklanjuti peningkatan sarana prasarana yang terdapat di daerah tersebut.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin pesat, menawarkan berbagai manfaat bagi para penggunanya. Melalui jaringan Internet, setiap orang dapat mengakses informasi melalui ponsel ataupun alat komunikasi lain dengan lebih mudah. Media sosial merupakan salah satu sarana untuk memperoleh informasi yang sering digunakan masyarakat saat ini. Salah satu kasus yang menimpa seorang warga Lampung yang bernama Bima Yudho Saputro terkait isu intimidasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Lampung.

Dari temuan analisis framing Robert N. Entman yang sudah dilaksanakan peneliti, maka penjabaran yang dilaksanakan Kompas.com dan Detik.com adalah:

1. *Define Problems*, Kompas.com menjabarkan adanya intimidasi dari pemerintah Lampung kepada salah satu warga yang mengkritik Lampung di media sosial TikTok dan Detik.com pun menuai pendefinisian masalah terkait isu yang sama. Hal tersebut menuai permasalahan hingga dilaporkan atas kritikan yang dibuat
2. *Diagnose Causes*, menurut Kompas.com banyak infrastruktur di Provinsi Lampung yang kurang memadai mulai dari jalanan rusak, sistem pendidikan lemah, tata kelola pemerintahan yang masih lemah dan sebagainya. Detik.com pun memberitakan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pertemuan khusus dengan Pemerintah Provinsi Lampung di mana akan membahas terkait anggaran Infrastruktur Provinsi Lampung.
3. *Make Moral Judgement*, yang diambil oleh Kompas.com dalam isu ini ialah mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa harus menghakimi dan melakukan intimidasi terhadap korban dan keluarganya. Sedangkan pada Detik.com lebih menunjukkan sikap keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.
4. *Treatment Recommendation*, dengan adanya kritikan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Lampung untuk memperbaiki kinerja dan

segala infrastruktur yang ada di kota tersebut. Pada media Detik.com menyampaikan rekomendasi terkait pemerintah yang harus mengayomi seluruh warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. (2023, April 18). *Soal Kasus Bima Kritik Lampung, Mahfud MD: Karena Ada Laporan Harus Diproses, Bisa Ditutup Jika Tak Terbukti.* Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/04/18/09315401/soal-kasus-bima-kritik-lampung-mahfud-karena-ada-laporan-harus-diproses-bisa>
- Creswell, J. W. (2016). *RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.).
- Damayanti, A. (2023, May 6). *Zulhas Ungkap Jalan di Lampung Ada yang Sudah Rusak 20 Tahun.* Detik.Com. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6706506/zulhas-ungkap-jalan-di-lampung-ada-yang-sudah-rusak-20-tahun>
- Darmawan, R. (2023, April 17). *Kronologi TikToker Bima Dipolisikan Usai Bikin Video “Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju.”* Kompas.Com.
<https://regional.kompas.com/read/2023/04/17/224347478/kronologi-tiktoker-bima-dipolisikan-usai-bikin-video-alasan-kenapa-lampung?page=all>
- DR. Deddy Mulyana, M. A. E. (2011). *ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (H. Nurul, Ed.; 6th ed.). PT LKiS Printing Cemerlang.
- Hikam, H. (2023a, April 18). *Jreng! Anggaran Infrastruktur Lampung Mulai Dipelototi Kemendagri.* Detik.Com. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6680329/jreng-anggaran-infrastruktur-lampung-mulai-dipelototi-kemendagri>
- Hikam, H. (2023b, May 5). *Jokowi Cek Jalanan di Lampung yang Dijuluki “Dajjal”, Apayang Bakal Dilakukan?* Detik.Com.
<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6704786/jokowi-cek-jalanan-di-lampung-yang-dijuluki-dajjal-apa-yang-bakal-dilakukan>
- Indraini, A. (2023, April 13). *Viral “Lampung Dajjal”, Jalanannya Bikin Geleng-geleng Kepala.* Detik.Com. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6670963/viral-lampung-dajjal-jalanannya-bikin-geleng-geleng-kepala>
- Kamil, I. (2023, April 17). *Saat Bima Yudho Kritik Lampung di TikTok: Diadukan ke Polisi, Diintimidasi hingga Dapat Dukungan.* Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/04/17/07591411/saat-bima-yudho-kritik-lampung-di-tiktok-diadukan-ke-polisi-diintimidasi>
- Kurniawan Siregar, A., & Qurniawati, F. (2022). *Analisis Framing Pemberitaan Buzzer ditempo.co.* 1(1), 1–15.
- Luxiana, K. (2023, April 17). *LPSK: TikToker Bima Bisa Ajukan Perlindungan Jika Terancam.* Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-6676785/lpsk-tiktoker-bima-bisa-ajukan-perlindungan-jika-terancam>

- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, Y. (2023, April 18). *Polda Lampung Hentikan Kasus TikToker Bima, Ini Respons Keluarga*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/18/190000965/polda-lampung-hentikan-kasus-tiktoker-bima-ini-respons-keluarga-?page=all>
- Shimp, A. T., & Andrews, Craig, J. (2013). Advertising, Promotion and Other aspects of Integrated Marketing Communications. *Cengage Learning*, 614.
- Wiryono, S. (2023, April 18). *Buntut Kritik TikToker, KPK Diminta Bergerak Periksa Pemprov Lampung*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/18/07352831/buntut-kritik-tiktoker-kpk-diminta-bergerak-periksa-pemprov-lampung>